



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. IKHWAN BURHANUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 464101

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/272 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1259 m2/133 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 10623 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 650.000.000
7. Tanah Seluas 2359 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD/MOBIL PENUMPANG Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY GM2 1.5 E A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 492.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 31.138.380



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.058.138.380
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.058.138.380

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.